



RENCANA KERJA (RENJA)

Tahun 2024



**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD)
Kabupaten Mojokerto**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I Pendahuluan..... 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum..... 2

 1.3. Maksud dan Tujuan..... 5

 1.4. Sistematika Penulisan..... 5

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu 7

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPKAD Tahun Lalu
 dan Capaian Renstra BPKAD 7

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD.....18

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tupoksi SKPD..... 21

 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 22

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 31

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 42

BAB V Penutup 47

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Rencana Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Penyusunan Ranwal Renja 2024 ini berpedoman kepada Rencana Strategik (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto Periode tahun 2022-2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.

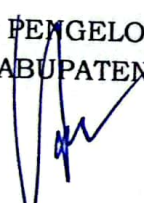
Rencana Awal Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang merupakan kebutuhan kinerja yang akan dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

Semoga Rencana Kerja ini dapat dijadikan pedoman bagi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam memenuhi target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan tersebut, agar mampu memberikan kontribusi positif bagi Kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto,

2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET KABUPATEN MOJOKERTO



Ir. MIEKE JULI ASTUTI, MSI.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640731 199003 2 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta melaksanakan kegiatan atas usulan masyarakat.

Rencana Awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun kedalam Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Renja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Renja Perangkat Daerah dibahas pada forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

Berdasarkan Tupoksinya maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 membuat Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran Visi dan Misi Perangkat Daerah dalam hal ini adalah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien serta akuntabel sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan dalam Pembangunan, maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, faktual dan realistis.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- f. Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- g. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- h. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- i. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur 2005-2025;
- u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur 2021-2026;

- v. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto 2021-2026;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5).
- x. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah dengan menentukan sasaran indikator dan penetapan kinerja dalam bentuk Penyusunan Program kegiatan, menentukan Lokasi kegiatan dan menyusun Indikator Kinerja kegiatan serta menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang, sehingga mampu menjawab tuntutan agar Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya di Kabupaten Mojokerto lebih efektif, efisien, lancar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun tujuannya sebagaimana renja yang telah ditetapkan adalah ***Meningkatnya pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah*** demi terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Renja, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, dengan target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Usulan Program dan Kegiatan beserta pagu pendanaannya. Tentunya Program dan Kegiatan yang diusulkan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran apa bila tidak sesuai dengan kebutuhan; serta kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPKAD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BPKAD

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian Renstra SKPD bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra SKPD. Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 pada umumnya dapat tercapai hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bernilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pencapaian Kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan serta indikator kinerja OPD dengan **Tujuan** untuk Meningkatnya pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah di Kabupaten Mojokerto dengan **Sasaran** meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan program dan kegiatan sebagaimana kami gambarkan dalam Tabel T-C-29 (Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Berjalan) berikut :

TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2022
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN MOJOKERTO

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Output					Target Kinerja Capaian Program (Restra Perangkat Daerah) tahun 2021-2026					Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun (N-3) 2021					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (N-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD N-1) 2023					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2023)																																												
																									Target Renja BPKAD (N-2) 2022										Realisasi Renja BPKAD (N-2) 2022					Tingkat Realisasi (%)					Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (TW I th 2023)					Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)																													
1					2					3					4					5					6					7					8 = 7/6					9					10 (5+7+9)					11 (10/4)																													
5										UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH																																																																					
5					02										BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																																																																
5					02					01										Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Nilai SAKIP Perangkat Daerah					85,60					85,13					84,0					-					-					84,40					84,40					100%														
5					02					01					2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan					100%					100%					100%					100%					100%					100%					100%					100%														
5					02					01					2.01					01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					25 dok					5 dok					5 dok					5 dok					100%					5 dok					15 dok					60%									
5					02					01					2.01					07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Jumlah Dokumen Perangkat Daerah					60 laporan					12 laporan					12 laporan					12 laporan					100%					12 laporan					36 dok					60%									
5					02					01					2.02										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan					100%					100%					100%					100%					100%					100%					100%					100%					100%				
5					02					01					2.02					01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN					50 org/bln					50 org/bln					50 org/bln					50 org/bln					100%					50 org/bln					48 org/bln					96%									
5					02					01					2.05										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan					100%					100%					100%					100%					100%					100%					100%					100%					100%				
5					02					01					2.05					02					Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Perlengkapannya					10 paket					2 paket					2 paket					2 paket					100%					2 paket					6 paket					60%									
5					02					01					2.05					02					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan					Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan					240 orang					180 orang					180 orang					180 orang					100%					180 orang					180 orang					75%									

5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	6 paket	60%
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	14 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	3 paket	7 paket	50%
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	60 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	36 paket	60%
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	6 paket	60%
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	240 dok	48 dok	48 dok	48 dok	100%	48 dok	144 dok	60%
5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	10 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	6 paket	60%
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 Laporan	60%
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 Laporan	60%
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	01	2.07		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	-	-	0%
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 Laporan	60%
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	374 laporan	86 laporan	86 laporan	86 laporan	100%	86 laporan	258 Laporan	69%
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaharui pajaknya dan dipelihara	35 unit	35 unit	35 unit	35 unit	100%	35 unit	35 unit	100%

5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perbaikan gedung kantor	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	100%	20 unit	20 unit	100%
5	02	02			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP	95%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	105%
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman	95%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	105%
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	750 dok	150 dok	150 dok	150 dok	100%	150 dok	450 dok	60%
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	750 dok	150 dok	150 dok	150 dok	100%	150 dok	450 dok	60%
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA dan RKAP yang diverifikasi	490 dok	98 dok	98 dok	98 dok	100%	98 dok	294 dok	60%
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA dan DPA Perubahan yang disusun	490 dok	98 dok	98 dok	98 dok	100%	98 dok	294 dok	60%
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah buku Perda APBD dan perbup penjabaran APBD yang disusun	2.250 buku	450 buku	450 buku	450 buku	100%	450 buku	1.350 buku	60%
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah buku Perda Perubahan APBD dan perbup penjabaran Perubahan APBD yang disusun	2.250 buku	450 buku	450 buku	450 buku	100%	450 buku	1.350 buku	60%
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan anggaran yang disusun	308 dok	49 dok	49 dok	49 dok	100%	49 dok	147 dok	48%
5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	75 dok	15 dok	15 dok	15 dok	100%	15 dok	45 dok	60%
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Hasil Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2.880 dok	576 dok	576 dok	576 dok	100%	576 dok	1.728 dok	60%
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya	60 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	36 dok	60%
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	40 dok	8 dok	8 dok	8 dok	100%	8 dok	24 dok	60%

5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	100%	300 orang	300 orang	100%
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Hasil Koordinasi pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	3.000 dok	600 dok	600 dok	600 dok	100%	600 dok	1.800 dok	60%
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	105 laporan	15 laporan	15 laporan	15 laporan	100%	15 laporan	45 dok	43%
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	1.620 dok	225 dok	225 dok	225 dok	100%	225 dok	675 dok	42%
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian daerah	26 dok	7 dok	7 dok	7 dok	100%	7 dok	21 dok	81%
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	100 orang	100%
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Bantuan Keuangan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	60%
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	60%
5	02	02	2.04	11	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	60 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	60%

5	02	03			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	95%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	105%
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	95%	100%	100%	100%	100%	95%	100%	105%
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun	4 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	4 dok	100%
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik daerah	Jumlah Standar Barang Milik daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik daerah	8 dok	-	-	-	-	2 dok	2 dok	25%
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	8 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	6 dok	75%
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	14 dok	-	-	-	-	5 dok	5 dok	36%
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	10 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	6 dok	60%
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1.900 laporan	500 laporan	500 laporan	500 laporan	100%	500 laporan	1.500 laporan	79%
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian barang Milik Daerah	17 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	12 dok	71%
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	35 dok	7 dok	7 dok	7 dok	100%	7 dok	21 dok	60%
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalm rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalm rangka penyusunan laporan barang milik daerah	2.310 laporan	-	-	-	-	576 laporan	576 laporan	25%
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	96 orang	96 orang	96 orang	96 orang	100%	96 orang	96 OPD	100%

Dari tabel diatas dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut :

Penjelasan Penjabaran Tabel diatas :

Dari tabel diatas dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut :

Penjelasan Penjabaran Tabel diatas :

1. Target Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pada tahun 2022 lalu BPKAD telah menargetkan capaian kinerja 100% dengan Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja keuangan BPKAD Tahun Anggaran 2022 diukur dari realisasi atas anggaran yang telah disepakati dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022. Total realisasi anggaran Tahun 2022 belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai tidak mencapai 100%. Sedangkan realisasi belanja mencapai 96.10% karena adanya efisiensi anggaran terhadap beberapa kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2022 diantaranya yaitu sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi sebesar 41.74%;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi sebesar 89.46%;
- 3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi sebesar 76.28%;
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi sebesar 61.52%

2. Target Indikator Kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pada Bidang Anggaran dengan indikator Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai Pedoman.

Pada tahun 2022 lalu BPKAD menargetkan 100% atas penyusunan RKA di OPD sesuai pedoman. Pencapaian target ini didasarkan pada Siklus Penyusunan APBD dan PAPBD dalam Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilandasi pedoman dari Menteri Dalam Negeri. Dari target capaian yang ditetapkan

tersebut dapat dikatakan **tercapai** karena Penyusunan APBD 2022 didukung Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam dokumen KUA dan Prioritas Plafon Anggaran sesuai RKPD Pemerintah Daerah.

Pencapaian atas target Indikator tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) Kegiatan dengan 8 (delapan) Sub Kegiatan, yaitu :

Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
6. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
7. Koordinasi dan penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
8. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

Dari pelaksanaan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk mencapai Indikator Kinerja “Prosentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman” dapat dikategorikan **sangat berhasil dengan capaian kinerja 100%**, hal ini dapat digambarkan bahwa ukuran keberhasilan dari pencapaian hasil Indikator tersebut bahwa Rancangan Akhir RKPD telah disajikan sesuai program dan Kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan, dimana RKA yang disusun Perangkat Daerah telah mengacu pada RKPD Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

3. Target Indikator Kinerja Program ke 2 yaitu Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan Keuangan sesuai SAP

Pada tahun 2022 pemerintah Daerah telah melakukan program dan kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan bagaimana bisa meningkat seluruh Perangkat Daerah menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP. Dari pelaksanaan Program dan kegiatan dengan indikator Program dapat dikatakan sangat berhasil. Keberhasilan ini dapat dicapai karena penetapan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan betul-

betul tepat sasaran, baik dari pembinaan, pengendalian, koordinasi maupun rekonsiliasi serta Asistensi penyusunan Laporan Keuangan kepada seluruh OPD tidak mengalami hambatan apapun.

Indikator tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program 2 (dua) kegiatan, 9 (sembilan) sub kegiatan yaitu :

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

1). Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2. Koordinasi, Fasilitasi, asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
3. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
4. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

2). Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Rekonsiliasi dan Verifikasi aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 2. Konsolidasi Laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
 5. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- 6. Target Indikator Kinerja Program yang ke 3 adalah Prosentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan**

Dengan diberlakukannya Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Pemerintah Daerah

menargetkan seluruh Perangkat Daerah dapat melaksanakan pengelolaan BMD tersebut sesuai amanat dalam Permendagri, dari Pendataan Aset, Penilaian Aset, Penghapusan Aset serta Pemindahtanganan Aset. Agar Indikator tersebut dapat tercapai Bidang Pengelolaan Aset telah menetapkan Program dan beberapa kegiatan yang mendukung keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator tersebut dilaksanakan melalui 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Standar Harga
2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah
4. Pengamanan Barang Milik Daerah
5. Penilaian Barang Milik Daerah
6. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
7. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Dari pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Bidang Pengelolaan Aset tersebut, seluruh OPD telah dilakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta rekonsiliasi secara berkesinambungan setiap bulan sehingga Target Indikator yang telah ditetapkan dapat dikatakan berhasil sebagaimana terlihat pada Tabel T-C.29 tersebut diatas.

Dengan demikian, Dari hasil evaluasi terhadap Indikator Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto diatas, dimana telah diuraikan masing-masing sesuai Target Indikator dapat disimpulkan bahwa keberhasilan atas tercapainya Indikator Sasaran pada RPJMD yaitu Opini BPK = WTP atas Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berhasil dari tahun ke tahun. Hal ini karena didukung atas keberhasilan atas Penetapan Indikator Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja secara berjenjang sampai dengan level Staf.

KESIMPULAN:

Berdasarkan pengukuran evaluasi kinerja yang telah dilakukan dapat disampaikan bahwa penyerapan anggaran Belanja pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2022 adalah sebesar 86,58 % atau sebesar Rp. 699.671.068.320,36 dari total pagu anggaran Belanja sebesar Rp. 808.111.533.573,00.

Belum optimalnya penyerapan anggaran disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman SDM dalam proses penyusunan penganggaran
2. Adanya efesiensi anggaran pada beberapa pelaksanaan kegiatan
3. Adanya regulasi proses pengadaan barang dan jasa

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan penganggaran berbasis kinerja
2. Mendorong penyempurnaan kualitas pelayanan publik.
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan para stakeholder

Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
2. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Sedangkan Permasalahan kurangnya dari segi pencapaian kinerja untuk mewujudkan tujuan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset tidak mencapai target yang diinginkan secara optimal, dikarenakan beberapa hal yaitu :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan yang berdisiplin Ekonomi Akuntansi ;
2. Rendahnya Kualitas Pengelola Keuangan di SKPD ;
3. Kurang Berperannya Kepala SKPD se Kab. Mojokerto selaku Pengguna Anggaran yang peduli terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan di bidang penatausahaan keuangan daerah ;

Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut, sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama dan berulang dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah diperlukan solusi sebagai berikut:

1. Memberikan pendampingan, pelatihan dan pembinaan secara berkesinambungan kepada para pengelola keuangan SKPD se-Kab. Mojokerto;

2. Melakukan evaluasi Kinerja dalam rangka penyempurnaan peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. Identifikasi faktor-faktor apa yang diharapkan mampu memberikan dukungan dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi;
4. Membangun keselarasan dan kesepahaman antar bidang lingkup Internal BPKAD dan SKPD se-Kab. Mojokerto melalui Koordinasi, Komunikasi dan konsolidasi.

Selanjutnya, sebagai upaya perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan peningkatan Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto, maka perlu dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kualitas SDM utamanya di Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset melalui kursus, pelatihan, asistensi dan pembinaan;
2. Memperbaiki system pengumpulan dan pengolahan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas system pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan SKPD;
3. Meningkatkan kualitas reuiu atas Laporan Kinerja SKPD;
4. Melakukan Validasi dan rekonsiliasi data asset dengan SKPD se Kab. Mojokerto

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan pada BPKAD

Berdasarkan pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta teramanatkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang juga bertindak selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Kinerja pelayanan tahun 2022 adalah bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah telah dilakukan dengan dukungan SKPD lain. Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Mojokerto, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Mojokerto harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2021-2026 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan mengilhami, berorientasi pada perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan, maka RENSTRA BPKAD harus (1) mencerminkan apa yang ingin dicapai, (2) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas (3) menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik (4) memiliki orientasi terhadap masa depan.

Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai perbedaan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam pelaporan keuangan, karena selaku BPKAD menyajikan 2 laporan keuangan, yaitu laporan keuangan selaku SKPD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Demikian juga dalam Penyusunan RKA/DPA, belanjanya berbeda dengan SKPD lain, karena terdapat belanja tidak terduga dan belanja transfer yang tidak terdapat di SKPD lain.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan mampu melaksanakan tanggung jawab yang diembannya, yang dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat permasalahan yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya laporan pengelolaan keuangan dan aset dari masing-masing SKPD
3. Terbatasnya SDM pengelola Keuangan yang memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai Disiplin Ilmu yang diinginkan.
4. Kurang peran aktifnya Kepala SKPD selaku PA terhadap pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah.
5. Kurangnya sarana dan prasarana serta peralatan penunjang kerja yang dimiliki.

Sedangkan dari sisi kualitas, sebagaimana Sasaran yang ditetapkan yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka dapat dikatakan sangat berhasil, hal ini dapat dilihat dari hasil Opini atas Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang telah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengeluaran (WTP) berturut-turut sebanyak 9 (sembilan)kali, hal ini dikarenakan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disajikan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana tergambar dalam Tabel T.C-30 berikut :

TABEL T.C-30
PENCAPAIAN KINERJA BPKAD

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Analisis Capaian
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	IT = Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Indikator Tujuan dapat tercapai, dikarenakan Program dan Kegiatan yang diusulkan dapat berjalan sesuai harapan, dimana outcome dari Program dan Ouput dari Kegiatan targetnya terpenuhi
2.	IS = Persentase OPD dengan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran ini dapat tercapai, dapat dilihat dari temuan BPK dari tahun ketahun berkurang dari segi tata kelola keuangan dan aset

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Faktor yang mempengaruhi permasalahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto ditinjau dari:

1. Gambaran Umum Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditentukan sebagai berikut :
 - Kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia belum optimal
 - Sarana dan Prasarana kerja perlu ditingkatkan.
 - Terbatasnya dana penunjang kegiatan.
 - Pembinaan dan pendayagunaan aparatur perlu ditingkatkan
 - Belum optimalnya koordinasi antar SKPD
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kelembagaan:
 - Tuntutan masyarakat untuk perbaikan kualitas pelayanan publik
 - Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan daerah
 - Belum maksimalnya peningkatan kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan
 - Adanya aset milik pemerintah daerah yang terabaikan
 - Belum optimalnya pendataan aset milik daerah
3. Sasaran Jangka Menengah RPJMD Kabupaten Mojokerto :
 Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021–2026 di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :
 1. Meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan serta implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat;
 2. Meningkatnya sumber daya manusia PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
 3. Meningkatnya kualitas PNS selaku pelayan masyarakat;
 4. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah sekaligus membangun terwujudnya aspirasi, partisipasi dan transparansi serta keterlibatan peran serta masyarakat;
 5. Terciptanya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi yang berdimensi kerakyatan;
 6. Terciptanya infrastruktur perekonomian dalam peningkatan pemberdayaan lingkungan sosial ekonomi;
 7. Tumbuh dan berkembangnya usaha agrobisnis, agroindustri dan pariwisata serta keterlibatan UMKM secara aktif;

8. Terjalinnnya hubungan harmonis dengan organisasi kemasyarakatan, keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat;
9. Terjalinnnya hubungan yang harmonis serta koordinasi yang efektif mulai dari Pemerintah Daerah, sampai ke tingkat pemerintahan terendah (pemerintah desa)
10. Terserapnya informasi, kreativitas dan inovasi masyarakat dan turut serta pada pembangunan daerah;
11. Meningkatnya prasarana pendidikan, tenaga pendidik dan prasarana lainnya yang dapat mendukung terbentuknya SDM yang berkualitas;
12. Terciptanya keselarasan antara imtaq dan iptek yang harus dimiliki oleh semua masyarakat (pelajar);
13. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana rumah sakit dan puskesmas serta peningkatan tenaga medis dan paramedis yang kompeten;
14. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
15. Meningkatnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sehingga terwujud suatu kondisi daerah yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan;
16. Meningkatnya pemberian pelayanan yang prima bagi masyarakat baik pelayanan yang bersifat perijinan maupun non perijinan;

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto. Disamping itu juga, dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten Mojokerto. Program dan kegiatan Tahun 2024 yang telah diusulkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2024 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Dalam rancangan akhir RKPD terhadap kebutuhan yang dapat dilihat pada Tabel T-C.31 dimana ada beberapa pagu program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena adanya hasil analisis kebutuhan terhadap beberapa sub kegiatan yang membutuhkan anggaran lebih.

TABEL T-C.31
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Pagu Indikatif
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	KEUANGAN				806.386.287.204					690.045.005.681
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		126.064.297.982	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		128.607.158.131
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan	100%	20.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan	100%	15.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	7.500.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	12 laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	12 laporan	7.500.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	38.407.613.925	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	33.374.215.259
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	38.407.613.925	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	33.374.215.259
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	796.961.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	500.000.000
	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Perlengkapannya	2 paket	60.000.000	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Perlengkapannya	2 paket	100.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	240 Orang	736.961.600	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	240 Orang	400.000.000

4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	1.167.624.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	924.040.000
	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	28.750.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	25.000.000
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	400.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	200.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	102.374.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	100.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	125.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	125.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan dan peraturan perundang-undangan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan bacaan dan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 Dokumen	23.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan bacaan dan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 Dokumen	30.000.000
	Penyediaan bahan/material	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 paket	100.000.000	Penyediaan Bahan / Material	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 paket	115.000.000
	Fasilitasi Kunjungan tamu	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	12 laporan	145.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	12 laporan	150.000.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	243.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	179.040.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	84.926.847.957	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	93.247.652.872
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	84.696.847.957	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	93.098.152.872
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72 laporan	230.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72 laporan	149.500.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100%	745.250.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100%	546.250.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	35 unit	200.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	35 unit	200.000.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	439.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	260.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	20 unit	106.250.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan pra sarana gedung kantor dan bangunan lainnya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	20 unit	86.250.000
B	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP	95%	677.202.117.222	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP	95%	558.317.945.550
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman	95%	1.675.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai pedoman	95%	1.675.000.000
	Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	150 Dokumen	175.000.000	Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	150 Dokumen	175.000.000
	Koordinasi penyusunan Perubahan KUA dan perubahan PPAS	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	150 Dokumen	160.000.000	Koordinasi penyusunan Perubahan KUA dan perubahan PPAS	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	150 Dokumen	160.000.000
	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA- SKPD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah RKA - SKPD yang diverifikasi	98 Dokumen	300.000.000	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA- SKPD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah RKA - SKPD yang diverifikasi	98 Dokumen	300.000.000
	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPA - SKPD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah DPA - SKPD yang diverifikasi	98 Dokumen	110.000.000	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPA - SKPD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah DPA - SKPD yang diverifikasi	98 Dokumen	110.000.000
	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	450 Dokumen	375.000.000	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	450 Dokumen	375.000.000
	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	450 Dokumen	375.000.000	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	450 Dokumen	375.000.000
	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang anggaran	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang disusun	70 Dokumen	40.000.000	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang anggaran	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang disusun	70 Dokumen	40.000.000
	Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	15 Dokumen	140.000.000	Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	15 Dokumen	140.000.000
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Hasil Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	1.447.925.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Hasil Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	976.055.000
	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	576 Dokumen	275.425.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	576 Dokumen	250.085.000

	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	12 Dokumen	172.500.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	12 Dokumen	155.250.000
	Koordinasi pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi NonTunai dengan lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi NonTunai dengan lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	8 Dokumen	150.000.000	Koordinasi pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi NonTunai dengan lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi NonTunai dengan lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	8 Dokumen	73.970.000
	Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	850.000.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	496.750.000
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Hasil Koordinasi pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah	100%	570.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Hasil Koordinasi pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah	100%	515.000.000
	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	600 Dokumen	150.000.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	600 Dokumen	100.000.000
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	25 Laporan	50.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	25 Laporan	45.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	390 Dokumen	220.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	390 Dokumen	220.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 Dokumen	50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 Dokumen	50.000.000

	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Pelaksanaan Bantuan Keuangan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	673.509.192.222	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase Pelaksanaan Bantuan Keuangan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	555.151.890.550
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	527.701.105.318	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	491.985.528.318
	Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	103.763.220.084	Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	25.563.066.554
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	12 Laporan	42.044.866.820	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	12 Laporan	37.603.295.678
C	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	95%	3.119.872.000	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	95%	3.119.902.000
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	95%	3.119.872.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	95%	3.119.902.000
	Penyusunan Standar Harga	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Standar Harga yang disusun	4 Dokumen	586.851.000	Penyusunan Standar Harga	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Standar Harga yang disusun	4 Dokumen	586.851.000
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	58.920.000	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	58.920.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	121.313.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	121.313.000
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	126.308.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	126.308.000

	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	340.422.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	340.422.000
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Hasil Dokumen inventarisasi (LHI) BMD	2 Laporan	41.250.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Hasil Dokumen inventarisasi (LHI) BMD	2 Laporan	41.250.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	300 Laporan	969.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	300 Laporan	969.000.000
	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	150.000.000	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	150.000.000
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	4 Laporan	63.558.000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	4 Laporan	63.558.000
	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7 Dokumen	195.320.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	7 Dokumen	195.350.000
	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	578 Laporan	49.140.000	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	578 Laporan	49.140.000
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	19.350.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	19.350.000
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	96 Orang	398.440.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	BPKAD Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	96 Orang	398.440.000

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat Sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan yang terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto dan dibutuhkan untuk meningkatkan tertib administrasi keuangan dan aset/barang daerah adalah Nihil, karena sampai dengan saat Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan baik dari Masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi serta dari Perangkat Daerah yang ditujukan langsung kepada kami tidak ada.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.

Pada Tahun 2024, dimana merupakan tahun pertama pelaksanaan program pembangunan Visi Misi Bupati terpilih dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. APBN merupakan instrumen kebijakan penting untuk mencapai tujuan nasional dan pelaksanaan program Nawacita. Pemerintah terus berkomitmen menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, dengan fokus prioritas pembangunan nasional pada 2024 adalah (1) pembangunan infrastruktur; (2) pengurangan kemiskinan serta kesenjangan antar-pendapatan dan antar wilayah; serta (3) perluasan kesempatan kerja. Perekonomian nasional tahun 2024 akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global yang masih dihadapkan pada ketidakpastian dan pertumbuhan yang terbatas. Untuk mengakselerasi perekonomian tahun 2024, Pemerintah akan merealisasikan belanja negara yang efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai prioritas dengan didukung oleh penerimaan negara yang optimal serta sumber pembiayaan yang terukur dan terkendali. Pemerintah akan terus meningkatkan penggunaan APBN, baik dari sisi penerimaan maupun belanja untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan agar terwujud keadilan sosial yang semakin nyata. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dicapai melalui peningkatan investasi yang akan terus didorong melalui kemudahan perizinan dan perbaikan iklim investasi, dengan penggunaan APBN sebagai katalis sekaligus pendorong pembangunan. Dengan demikian, tema kebijakan fiskal tahun 2024 adalah “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Sebagaimana diketahui Misi ke 3 Rencana jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan”.

Sedangkan untuk mencapai misi tersebut diatas, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mojokerto agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto Sesuai dengan Dokumen Renstra Tahun 2021-2026 menentukan tujuan dan arah dalam melaksanakan Pembangunan sesuai dengan Tupoksinya yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategik . Tujuan tersebut harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam tujuan strategik untuk mengimplementasikan misi. Tujuan Strategik tersebut adalah Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Berkualitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dengan Indikator Tujuan adalah Opini BPK.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Indikator Persentase OPD dengan tata kelola keuangan dan aset daerah yang baik.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan berkualitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya dukungan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan 3 (tiga) program yang diaplikasikan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang direncanakan BPKAD Kabupaten Mojokerto sebagai Pelaksanaan pencapaian misi ke 3 RPJMD pada tahun 2024, terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran. Program ini mengusulkan Pagu pada Tahun 2024 sebesar Rp. 128.607.158.131,-
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program ini bertujuan untuk Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan dalam mengelola Laporan Keuangan Daerah. Program ini mengusulkan Pagu Pada Tahun 2024 sebesar Rp.558.317.945.550,-
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program ini bertujuan untuk Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aplikasi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan BMD sesuai

ketentuan. Program ini mengusulkan Pagu Pada Tahun 2024 sebesar Rp. 3.119.902.000,-

Dalam Menjalankan Program tersebut harus menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat top-down didasarkan pada sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah antara program Prioritas dan indikator sasaran dalam mendukung RPJMD. Untuk BPKAD Indikator sasaran RPJMD adalah Opini BPK terhadap Akuntabilitas keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto dengan target (WTP) dan untuk mempertahankan opini yang telah diraih pada tahun 2022, maka BPKAD mengusulkan beberapa kegiatan sebagaimana tertuang dalam Tabel T-C.33 berikut:

TABEL T-C. 33									
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024									
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025									
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO									
Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5,02	KEUANGAN				689.920.847.681,00				814.953.877.819,00
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BPKAD	100%	128.607.158.131,00	APBD		100%	134.100.641.297,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	BPKAD	100%	15.000.000,00	APBD		100%	20.000.000,00
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BPKAD	5 dokumen	7.500.000,00	APBD		5 dokumen	10.000.000,00
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKAD	12 laporan	7.500.000,00	APBD		12 laporan	10.000.000,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	BPKAD	100%	33.374.215.259,00	APBD		100%	38.407.613.925,00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPKAD	50 Orang/bulan	33.374.215.259,00	APBD		50 Orang/bulan	38.407.613.925,00

5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan	BPKAD	100%	500.000.000,00	APBD		100%	560.000.000,00
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Perlengkapannya	BPKAD	2 paket	100.000.000,00	APBD		2 paket	60.000.000,00
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	BPKAD	240 Orang	400.000.000,00	APBD		240 Orang	500.000.000,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	BPKAD	100%	924.040.000,00	APBD		100%	1.029.624.500,00
5.02.01.2.06.01	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	BPKAD	2 paket	25.000.000,00	APBD		2 paket	28.750.000,00
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	BPKAD	3 paket	200.000.000,00	APBD		3 paket	250.000.000,00
5.02.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	BPKAD	12 paket	100.000.000,00	APBD		12 paket	102.374.500,00
5.02.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	BPKAD	2 paket	125.000.000,00	APBD		2 paket	125.000.000,00
5.02.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	BPKAD	48 Dokumen	30.000.000,00	APBD		48 Dokumen	35.000.000,00
5.02.01.2.06.07	Penyediaan bahan/material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	BPKAD	2 paket	115.000.000,00	APBD		2 paket	100.000.000,00
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	BPKAD	12 laporan	150.000.000,00	APBD		12 laporan	145.000.000,00
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BPKAD	12 laporan	179.040.000,00	APBD		12 laporan	243.500.000,00

5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang dilaksanakan	BPKAD	100%	93.247.652.872,00	APBD		100%	93.338.152.872,00
5.02.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	BPKAD	12 laporan	93.098.152.872,00	APBD		12 laporan	93.108.152.872,00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	BPKAD	72 laporan	149.500.000,00	APBD		72 laporan	230.000.000,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pememerintah daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah daerah yang dilaksanakan	BPKAD	100%	546.250.000,00	APBD		100%	745.250.000,00
5.02.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	BPKAD	35 unit	200.000.000,00	APBD		35 unit	200.000.000,00
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	BPKAD	1 unit	260.000.000,00	APBD		1 unit	439.000.000,00
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	BPKAD	20 unit	86.250.000,00	APBD		20 unit	106.250.000,00
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah.	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai SAP	BPKAD	95%	558.317.945.550,00	APBD		95%	677.258.379.722,00
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase OPD yang menyusun RKA sesuai Pedoman	BPKAD	95%	1.675.000.000,00	APBD		95%	2.010.000.000,00
5.02.02.2.01.01	Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	BPKAD	150 Dokumen	175.000.000,00	APBD		150 Dokumen	210.000.000,00
5.02.02.2.01.02	Koordinasi penyusunan Perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	BPKAD	150 Dokumen	160.000.000,00	APBD		150 Dokumen	192.000.000,00

5.02.02.2.01.03	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA - SKPD yang diverifikasi	BPKAD	98 Dokumen	300.000.000,00	APBD		98 Dokumen	360.000.000,00
5.02.02.2.01.05	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPA - SKPD	Jumlah DPA - SKPD yang diverifikasi	BPKAD	98 Dokumen	110.000.000,00	APBD		98 Dokumen	132.000.000,00
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKAD	450 Dokumen	375.000.000,00	APBD		450 Dokumen	450.000.000,00
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	450 Dokumen	375.000.000,00	APBD		450 Dokumen	450.000.000,00
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang disusun	BPKAD	70 Dokumen	40.000.000,00	APBD		70 Dokumen	48.000.000,00
5.02.02.2.01.12	Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	BPKAD	15 Dokumen	140.000.000,00	APBD		15 Dokumen	168.000.000,00
5.02.02.2.02	Koordinasi pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Hasil Koordinasi pengelolaan perbendaharaan Daerah	BPKAD	100%	976.055.000,00	APBD		100%	1.169.187.500,00
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	BPKAD	576 Dokumen	250.085.000,00	APBD		576 Dokumen	275.425.000,00
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	BPKAD	12 Dokumen	155.250.000,00	APBD		12 Dokumen	172.500.000,00
5.02.02.2.02.06	Koordinasi pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi NonTunai dengan lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi NonTunai dengan lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	BPKAD	8 Dokumen	73.970.000,00	APBD		8 Dokumen	150.000.000,00

5.02.02.2.02.11	Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	300 Orang	496.750.000,00	APBD		300 Orang	571.262.500,00
5.02.02.2.03	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah	Persentase Hasil Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah	BPKAD	100%	515.000.000,00	APBD		100%	570.000.000,00
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	BPKAD	600 Dokumen	100.000.000,00	APBD		600 Dokumen	150.000.000,00
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	BPKAD	25 Laporan	45.000.000,00	APBD		25 Laporan	50.000.000,00
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKAD	390 Dokumen	220.000.000,00	APBD		390 Dokumen	220.000.000,00
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKAD	4 Dokumen	50.000.000,00	APBD		4 Dokumen	50.000.000,00
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	100 Orang	100.000.000,00	APBD		100 Orang	100.000.000,00

5.02.02.2.04	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Bantuan Keuangan urusan kewenangan pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	100%	555.151.890.550,00	APBD		100%	673.509.192.222,00
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKAD	12 Laporan	491.985.528.318,00	APBD		12 Laporan	527.701.105.318,00
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKAD	12 Laporan	25.563.066.554,00	APBD		12 Laporan	103.763.220.084,00
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	BPKAD	12 Laporan	37.603.295.678,00	APBD		12 Laporan	42.044.866.820,00
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	BPKAD	100%	2.995.744.000,00	APBD		100%	3.594.856.800,00
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	BPKAD	100%	2.995.744.000,00	APBD		100%	3.594.856.800,00
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	BPKAD	4 Dokumen	586.851.000	APBD		4 Dokumen	704.221.200,00
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	2 Dokumen	58.920.000	APBD		2 Dokumen	70.704.000,00
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKAD	2 Dokumen	121.313.000	APBD		2 Dokumen	145.575.600,00
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	3 Dokumen	126.308.000	APBD		3 Dokumen	151.569.600,00
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKAD	2 Laporan	340.422.000	APBD		2 Laporan	408.506.400,00
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKAD	300 Laporan	969.000.000	APBD		300 Laporan	1.162.800.000,00

5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	BPKAD	3 Laporan	150.000.000	APBD		3 Laporan	180.000.000,00
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKAD	7 Dokumen	195.350.000	APBD		7 Dokumen	234.384.000,00
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah	BPKAD	578 Laporan	49.140.000	APBD		578 Laporan	58.968.000,00
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKAD	96 Orang	398.440.000	APBD		96 Orang	478.128.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada rancangan Awal RKPD Pemerintah Daerah yang memuat Program dan kegiatan dengan pagu pendanaan yang dibutuhkan. Dalam melaksanakan Program perlu dukungan kegiatan yang didasarkan pada sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah antara program Prioritas dan indikator sasaran dalam mendukung RPJMD. Tentunya Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh BPKAD Kabupaten Mojokerto yang berpengaruh dan berimplikasi langsung terhadap pencapaian atas Indikator sasaran RPJMD yakni Opini BPK terhadap Akuntabilitas keuangan Daerah dengan target (WTP) dan untuk mempertahankan opini yang telah diraih pada tahun 2022 tersebut, maka BPKAD mengusulkan beberapa Program dan kegiatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan dengan kegiatan sebagai berikut :

1.1 Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah diusulkan sebesar Rp. 7.500.000,-

1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diusulkan sebesar Rp. 7.500.000,-

1.2 Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

1.2.1 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN diusulkan sebesar Rp. 33.374.215.259,-

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, diusulkan sebesar 100.000.000,-

1.3.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan diusulkan sebesar 400.000.000,-

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Dengan Sub Kegiatan :

- 1.4.1 Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor diusulkan sebesar Rp. 25.000.000,-
- 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor diusulkan sebesar Rp. 200.000.000,-
- 1.4.3 Penyediaan bahan logistik kantor diusulkan sebesar Rp.100.000.000,-
- 1.4.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan diusulkan sebesar Rp. 125.000.000,-
- 1.4.5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan diusulkan sebesar Rp. 30.000.000,-
- 1.4.6 Penyediaan bahan/material diusulkan sebesar Rp.115.000.000,-
- 1.4.7 Fasilitas Kunjungan tamu diusulkan sebesar Rp.150.000.000,-
- 1.4.8 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD diusulkan sebesar Rp. 179.040.000,-

1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan Sub Kegiatan:

- 1.5.1 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik diusulkan sebesar Rp. 93.098.152.872,-
- 1.5.2 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor diusulkan sebesar Rp. 149.500.000,-

1.6 Kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- 1.6.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan diusulkan sebesar Rp. 200.000.000,-
- 1.6.2 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya diusulkan sebesar Rp. 260.000.000,-
- 1.6.3 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya diusulkan sebesar Rp.86.250.000,-

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan Pembinaan, Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan dengan kegiatan sebagai berikut :

2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana anggaran daerah

2.1.1 Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS diusulkan sebesar Rp. 175.000.000,-

2.1.2 Koordinasi penyusunan Perubahan KUA dan perubahan PPAS diusulkan sebesar Rp. 160.000.000,-

2.1.3 Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD diusulkan sebesar Rp. 300.000.000,-

2.1.4 Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD diusulkan sebesar Rp. 110.000.000,-

2.1.5 Koordinasi dan penyusunan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD diusulkan sebesar Rp. 375.000.000,-

2.1.6 Koordinasi dan penyusunan Perda tentang PAPBD dan Perkada tentang Penjabaran PAPBD diusulkan sebesar Rp. 375.000.000,-

2.1.7 Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang anggaran diusulkan sebesar Rp. 40.000.000,-

2.1.8 Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan diusulkan sebesar Rp. 140.000.000,-

2.2 Koordinasi pengelolaan Perbendaharaan Daerah

2.2.1 Koordinasi dan pengelolaan kas daerah diusulkan sebesar Rp. 250.085.000,-

2.2.2 Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya diusulkan sebesar Rp. 155.250.000,-

2.2.3 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank diusulkan sebesar Rp. 73.970.000,-

2.2.4 Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota diusulkan sebesar Rp. 496.750.000,-

2.3 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi pelaporan keuangan Daerah

2.3.1 Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban diusulkan sebesar Rp. 100.000.000,-

- 2.3.2 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diusulkan sebesar Rp.45.000.000,-
- 2.3.3 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota diusulkan sebesar Rp. 220.000.000,-
- 2.3.4 Koordinasi, Singkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah diusulkan sebesar Rp. 50.000.000,-
- 2.3.5 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota diusulkan sebesar Rp. 100.000.000,-
- 2.4 Penunjang urusan kewenangan pengelolaan Daerah
 - 2.4.1 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan diusulkan sebesar Rp. 491.985.528.318,-
 - 2.4.2 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak diusulkan sebesar Rp. 25.563.066.554,-
 - 2.4.3 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota diusulkan sebesar Rp. 37.603.295.678,-

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

adalah keseluruhan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Program ini meliputi kegiatan :

- 3.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 3.1.1 Penyusunan Standar Harga diusulkan sebesar Rp.586.851.000,-
 - 3.1.2 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah diusulkan sebesar Rp.58.920.000,-
 - 3.1.3 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah diusulkan sebesar Rp. 121.313.000,-

- 3.1.4 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah diusulkan sebesar Rp. 126.308.000,-
- 3.1.5 Penatausahaan BMD diusulkan sebesar Rp. 340.422.000,-
- 3.1.6 Pengamanan BMD diusulkan sebesar Rp. 969.000.000,-
- 3.1.7 Penilaian Barang Milik Daerah diusulkan sebesar Rp.150.000.000,-
- 3.1.8 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah diusulkan sebesar Rp. 195.350.000,-
- 3.1.9 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD diusulkan sebesar Rp. 49.140.000,-
- 3.1.10 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah kabupaten/Kota diusulkan sebesar Rp. 398.440.000,-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2024 yang akan datang.

Pengelolaan Keuangan yang Baik mengandung maksud mampu mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, akuntabel, tertib dan disiplin dalam batasan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan Visi tersebut merupakan perwujudan cita-cita dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto, agar dapat berjalan dinamis dan tercapai dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun kedepan.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan Visi – Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Target capaian yaitu Opini BPK = WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Mojokerto,

2023

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**

Ir. MIEKE JULI ASTUTI, MSI.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640731 199003 2 005